

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 menimbulkan status kedaruratan di Indonesia. Melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, Indonesia telah mengumumkan status kedaruratan kesehatan. Berbagai upaya dilakukan dalam rangka mengatasi dampak pandemi Covid-19. Salah satunya adalah upaya vaksinasi. Namun, di masyarakat timbul pro kontra terkait vaksinasi tersebut. Sejumlah kalangan masyarakat menolak untuk divaksin. Oleh sebab itu, penulisan ini akan menjelaskan apakah vaksinasi merupakan hak atau kewajiban bagi masyarakat dan apakah penolak vaksin dapat dikenakan sanksi pidana. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji isu hukum yakni konflik norma antara Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular. Dalam konflik norma tersebut pisau pembedah atau analisisnya menggunakan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa vaksinasi yang pada mulanya adalah hak setiap orang, dapat menjadi suatu kewajiban mengingat situasi kedaruratan di Indonesia saat ini. Hal ini karena seseorang yang tidak divaksin berpotensi untuk menularkan bahkan membunuh orang lain. Adapun mengenai pemidanaan, hal tersebut seyogyanya menjadi *ultimum remedium*, apabila pranata-pranata lainnya seperti metode persuasif, sosialisasi bahkan sanksi administrasi terkait vaksinasi sudah tidak dapat berfungsi sedangkan kondisi kedaruratan kesehatan di Indonesia semakin memburuk.

Kata Kunci: vaksinasi, hak asasi, warga negara, tanggung jawab, sanksi pidana

ABSTRACT

*The Covid-19 pandemic has created an emergency status in Indonesia. Through Presidential Decree No. 11 of 2020, Indonesia has declared a health emergency status. Various efforts were made to overcome the impact of the Covid-19 pandemic. One of them is vaccination efforts. However, in the community there are pros and cons related to the vaccination. Some communities refuse to be vaccinated. Therefore, this paper will explain whether vaccination is a right or obligation for the community and whether vaccine refusal can be subject to criminal sanctions. This research is a normative legal research by examining legal issues, namely the conflict of norms between Article 5 paragraph (3) of Law Number 36 of 2009 concerning Health and Article 14 paragraph (1) of Law Number 4 of 1984 concerning Outbreaks of Infectious Diseases. In this norm conflict, the scalpel or analysis uses the *Lex Specialis Derogat Legi Generali* principle. The results show that vaccination, which was originally the right of everyone, can become an obligation considering the current emergency situation in Indonesia. This is because someone who is not vaccinated has the potential to infect or even kill other people. As for punishment, it should be the *ultimum remedium*, if other institutions such as persuasive methods, socialization and even administrative sanctions related to vaccination are no longer functioning, while health emergencies in Indonesia are getting worse.*

Keywords: vaccination, human rights, citizen, responsibility, criminal sanctions